



TESIS

Judul:

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Natural Persada
Mandiri Terhadap Penambangan di Dalam Kawasan
Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor
927 K/PID.SUS-LH/2021)

Disusun oleh:

LIDYA ARI VEGA JACOB
NIM. 207221003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT. NATURAL
PERSADA MANDIRI TERHADAP PENAMBANGAN DI DALAM
KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 927
K/PID.SUS-LH/2021)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Lidya Ari Vega Jacob

NIM : 207221003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : LIDYA ARI VEGA JACOB
NIM : 207221003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Natural Persada Mandiri Terhadap Penambangan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 927 K/PID.SUS-LH/2021)
Title : The Corporate Criminal Liability of PT. Natural Persada Mandiri for Mining in Forest Areas Without Permit (Study of Decision Number 927 K/PID.SUS-LH/2021)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

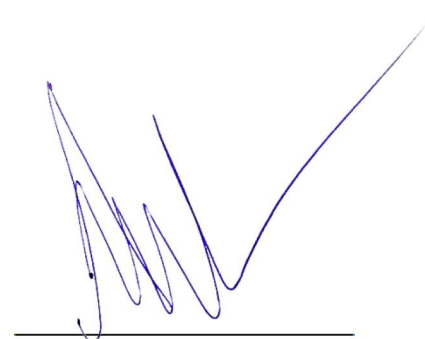
Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan

Nama : LIDYA ARI VEGA JACOB
NIM : 207221003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Natural
Persada Mandiri Terhadap Penambangan di Dalam
Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 927
K/PID.SUS-LH/2021)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long, sweeping upward stroke on the right side, positioned above a horizontal line.

ABSTRAK

Kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengaturan perizinan tambang di Indonesia khususnya PT. Natural Persada Mandiri dan pertanggungjawaban pidana korporasi PT. Natural Persada Mandiri terhadap penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin pada studi putusan nomor 927 K/PID.SUS-LH/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur pengaturan perizinan tambang di indonesia khususnya PT. Natural Persada Mandiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai jenis perizinan pertambangan. Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, izin usaha pertambangan diberikan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pasal 23 Nomor 23 Tahun 2010 dalam pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni: a). Administratif, b). Teknis, c). Lingkungan, dan d). Finansial. Bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan pada PT. Natural Persada Mandiri terkait penambangan ilegal di kawasan hutan tanpa izin dengan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang mengatur pidana penjara 8 hingga 20 tahun dan denda minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) hingga maksimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi korporasi yang melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana Korporasi, Penambangan, Kawasan Hutan.

ABSTRACT

Corporate crime is unlawful corporate behavior in the form of collective legal violations with the aim of achieving organizational goals. The purpose of this study is to determine and analyze the procedures for regulating mining licensing in Indonesia, especially PT Natural Persada Mandiri and the corporate criminal liability of PT Natural Persada Mandiri for mining in forest areas without a permit in the study of decision number 927 K/PID.SUS-LH/2021. The research method used is descriptive analytical normative legal research. The results of this study indicate that the application of mining licensing regulatory procedures in Indonesia, especially PT Natural Persada Mandiri, has been regulated in the provisions of Article 1 of Law No. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal and Article 1 of Law No. 3 of 2020 concerning types of mining licenses. Article 7 Number 23 of 2010 concerning the implementation of mineral and coal mining business activities, mining business licenses are granted through 2 (two) stages, namely Mining Business License Area (WIUP) and Mining Business License (IUP). Article 23 Number 23 Year 2010 in granting a production operation mining business license must fulfill 4 (four) conditions, namely: a). Administrative, b). Technical, c). Environmental, and d). Financial. The form of liability imposed on PT Natural Persada Mandiri related to illegal mining in forest areas without a permit with a fine of Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah) is not in accordance with the provisions of Article 89 paragraph (2) of Law No. 18 of 2013 which regulates imprisonment of 8 to 20 years and a minimum fine of Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) to a maximum of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah) for corporations that carry out illegal mining activities in forest areas.

Keywords : Accountability, Corporate Crime, Mining, Forest Areas.

Pernyataan

Nama : LIDYA ARI VEGA JACOB
NIM : 207221003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Natural
Persada Mandiri Terhadap Penambangan di Dalam
Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 927
K/PID.SUS-LH/2021)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2023
Yang menyatakan



LIDYA ARI VEGA JACOB
NIM. 207221003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT. NATURAL PERSADA MANDIRI TERHADAP PENAMBANGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021)”.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, saya banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T, M.M., I.P.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

7. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Kedua Orang Tua, yang telah mendoakan, membantu, dan mendukung baik moril maupun materil.
9. Dominic M. C., as my beloved partner who support me in every step of a way.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun saya sadar bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Hukum, terkhususnya dalam Kajian Tindak Pidana Korporasi.

Jakarta, 18 Desember 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Kegunaan Penelitian	19
D. Kerangka Konseptual	21
E. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
4. Pendekatan Penelitian	34
5. Teknik Analisis Data	35
F. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Landasan Konseptual.....	43

B. Teori	64
C. Penelitian Terdahulu.....	82
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	87
A. Prosedur Pengaturan Perizinan Tambang Di Indonesia Khususnya PT. Natural Persada Mandiri.....	87
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Natural Persada Mandiri Terhadap Penambangan Didalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-Lh/2021	94
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	109
A. Analisis Prosedur Pengaturan Perizinan Tambang di Indonesia Khususnya PT. Natural Persada Mandiri.....	109
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. Natural Persada Mandiri Terhadap Penambangan Didalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Studi Putusan Nomor 927 K/PID.SUS-LH/2021.....	131
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA.....	158

DAFTAR SINGKATAN

HAKI	adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual
HKI	adalah Hak Kekayaan Intelektual
IPR	adalah Izin Pertambangan Rakyat
IUP	adalah Izin Usaha Pertambangan
IUP OP	adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUPK	adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Perma	adalah Peraturan Mahkamah Agung
PP	adalah Peraturan Pemerintah
RI	adalah Republik Indonesia
SK KLHK	adalah Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
USD	adalah United States Dollar (Dolar Amerika Serikat)
UU	adalah Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual..... **Error! Bookmark not defined.**